

BAB 1

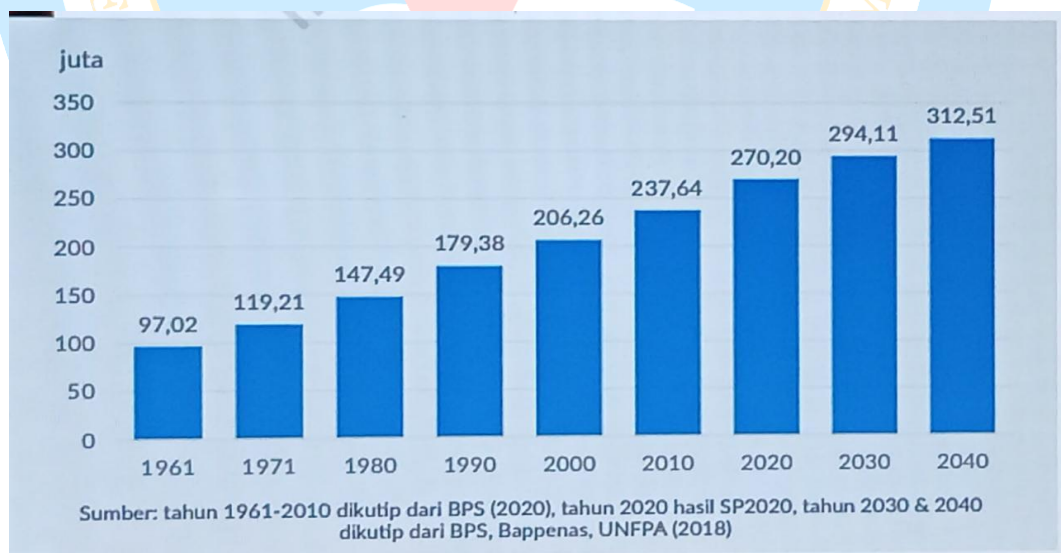
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan penduduk di Indonesia pada saat ini semakin meningkat dibandingkan dengan negara lainnya. Pertumbuhan penduduk di Indonesia akan mempengaruhi beberapa aspek kehidupan, baik dari segi ekonomi ataupun segi sosial. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk di negara Indonesia merupakan sasaran dari pembangunan Nasional yang mendasar pada Sumber Daya Manusia.

Masalah terbesar dari pembangunan yaitu selalu dipengaruhi oleh negara-negara berkembang. Masalah utama dengan kualitas hidup yang buruk. Inisiatif untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk telah menjadi penekanan utama kebijakan dan program kependudukan Indonesia selama ini.

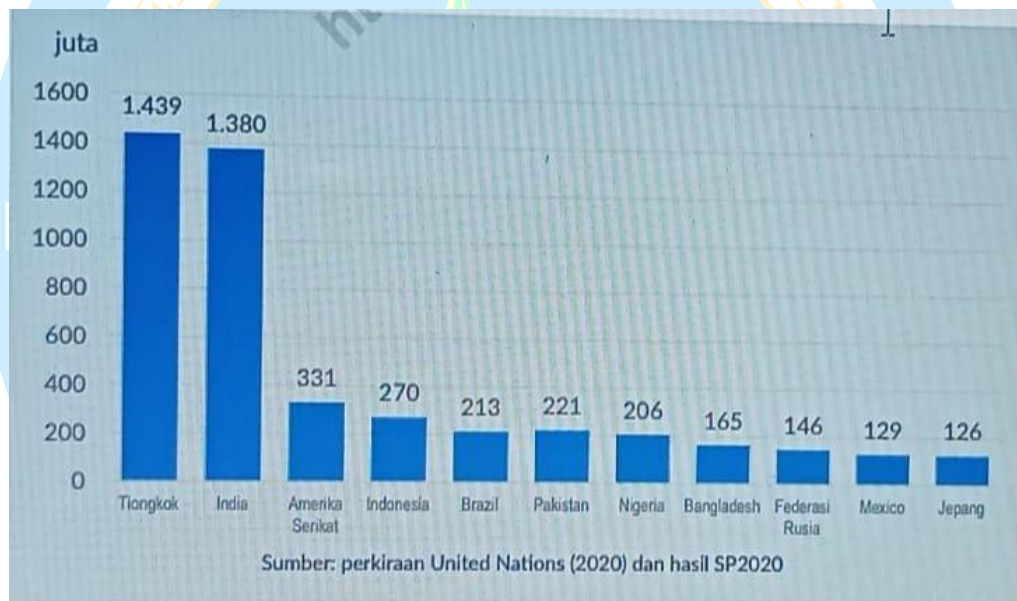
Gambar 1.1 Jumlah Penduduk Indonesia (Juta Jiwa),1961-2040



Sumber : Buku Analisis Profil Penduduk Badan Pusat Statistik.

Dilihat dari tabel diatas pada tahun 2020 jumlah penduduk Indonesia meningkat hampir 300 juta jiwa, dimana dapat dikatakan bahwa setiap tahun Bangsa Indonesia mengalami kenaikan Jumlah penduduk yang sangat pesat. Jumlah penduduk Indonesia tahun 2020 adalah jumlah penduduk tertinggi keempat di dunia. Kepadatan penduduk yang tinggi dapat memunculkan tantangan tersendiri dalam pengelolaannya karena memiliki permasalahan yang lebih kompleks.

Gambar 1.2 Negara dengan Jumlah Penduduk Terbanyak di Dunia(Juta Jiwa),2020



Sumber : Buku Analisis Profil Penduduk Badan Pusat Statistik.

Badan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mendesak pemerintah untuk mengatasi masalah pengendalian penduduk serta pembangunan keluarga berencana dan kesejahteraan keluarga dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Pembangunan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, yang

menjadi landasan bagi Pembangunan Kependudukan dan program Keluarga Berencana (Sumba et al., 2021).

Indonesia dipandang sebagai negara berkembang, terutama mengingat peningkatan populasi yang cepat di negara ini. Jumlah penduduk Indonesia yang besar akan memperlambat kemajuan di beberapa daerah. Indonesia menghadapi sejumlah masalah, antara lain tingginya angka pengangguran, kemiskinan yang ekstrim, pembangunan yang tidak merata, kualitas pendidikan yang tidak merata, dan masalah lainnya (Wahyu Perdana & Suyanto, 2019).

Berdasarkan Data Pusat Statistik Nasional, pencatatan masyarakat miskin semakin meningkat, terutama yang ada di Pulau Sumatra. Peningkatan angka kemiskinan tersebut merupakan salah satu bentuk masalah pembangunan yang dihadapi oleh negara Indonesia. Faktor utama dari kemiskinan ini juga disebabkan oleh peningkatan jumlah penduduk yang mengakibatkan antara lapangan pekerjaan dengan sumber daya manusia tidak seimbang.

Potensi kesejahteraan masyarakat juga dipengaruhi oleh jumlah penduduk yang besar, dan pembangunan mungkin tidak akan berhasil meskipun demikian. Ada dua sudut pandang yang berlawanan ketika ada populasi besar. Indonesia harus bertransisi dari negara berkembang menjadi negara maju, yang dapat menjadi salah satu kekuatan terbesarnya, tetapi juga dapat membuat beban bangsa semakin berat (Lettiyani et al., 2020).

Laju pertumbuhan penduduk yang sangat pesat serta penyebaran penduduk yang tidak merata sehingga mengakibatkan sulitnya negara dalam meningkatkan kualitas dan mutu penduduk. Rendahnya pembangunan serta keluarga kecil yang

berkualitas merupakan masalah kependudukan yang ada di Indonesia. Adapun rendahnya pengetahuan, kesadaran pasangan usia subur, dan remaja akan hak hak reproduksi, masih rendahnya ekonomi dan ketahanan keluragra juga termasuk permasalahan pembangunan penduduk yang ada di negara Indonesia (SUMANTO, 2021).

Perkawinan dini, tingginya angka kematian ibu dan bayi baru lahir, dan peningkatan populasi yang cepat hanyalah beberapa dari masalah rumit yang berkaitan dengan populasi. Demografi merupakan masalah kependudukan yang dapat menjadi kritis dan tidak dapat dihindari. Pertambahan penduduk yang terus menerus tinggi akan menimbulkan berbagai persoalan, antara lain persoalan penurunan kualitas sumber daya manusia, pengangguran, ketenagakerjaan, kriminalitas, dan persoalan lain yang berdampak negatif bagi kehidupan di Indonesia, khususnya (Nurjannah & Susanti, 2018).

Masalah kependudukan sulit dipecahkan di daerah dengan jumlah penduduk yang tinggi. Untuk memperlambat laju pertumbuhan penduduk, diperlukan upaya yang berkelanjutan. Pembuatan kebijakan dari pemerintah yang memiliki peran dan kewajiban dalam mengatasi masalah pertumbuhan penduduk merupakan salah satu tindakan yang dapat dilakukan. Program Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu langkah yang diambil pemerintah Indonesia untuk mengatasi masalah kependudukan (Nopiyanti, 2019).

Salah satu tahapan yang diakui dalam mengatasi pertumbuhan penduduk adalah program keluarga berencana. Di luar ukuran populasi, faktor sosial dan ekonomi juga dapat dikendalikan. Selain fokus pada pertumbuhan penduduk,

pembentukan Program Keluarga Berencana (KB) juga dapat diintegrasikan dengan program daerah yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan dengan memaksimalkan kemampuan penduduk setempat untuk meningkatkan taraf hidup baik dari segi kesehatan maupun ekonomi (Sugianto, 2021).

Program Keluarga Berencana dibentuk atas dasar beberapa hal, diantaranya:

1. Program Keluarga Berencana tidak lagi pandang oleh masyarakat.
2. Penguatan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga (KKBPK) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, dan untuk masyarakat.
3. Mewujudkan pembangunan Indonesia yang baik dan berkualitas

Pengurangan pertumbuhan penduduk diperkirakan akan menurunkan tingkat kemiskinan karena akan meringankan beban keluarga. Diharapkan melalui kampung KB ini akan terwujud sejumlah inovasi taktis yang dapat menjadi contoh implementasi sejumlah proyek penting di lapangan, khususnya yang terkait dengan Program Kependudukan Keluarga Berencana Dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) (Saputra et al., 2019).

Akibat program keluarga berencana yang pengaruh sosialnya kecil, penduduk Indonesia berkembang dengan cepat. Hal ini disebabkan karena pemerintah belum melakukan sosialisasi yang baik kepada masyarakat tentang program KB, sehingga terjadi penurunan keterlibatan dan pemahaman masyarakat tentang nilai program tersebut, serta penurunan jumlah pasangan suami istri. menggunakan kontrasepsi. Sekalipun pemerintah menasihati dua anak lebih baik dalam semboyan BKKBN, masih banyak masyarakat kelas menengah dan bawah di

Indonesia, khususnya di daerah pedesaan, yang memilih untuk menikah dengan mudah (Yulia Singgih D. Gunarsah, 2012).

Untuk mengatasi masalah pertumbuhan penduduk, pemerintah Indonesia kemudian berkonsentrasi pada pengelolaan inisiatif keluarga berencana. Pada hakekatnya, hasil program KB bermanfaat bagi pertumbuhan dan perkembangan masyarakat Indonesia. BKKBN sebuah lembaga nonkementerian, namun bekerja sama dengan instansi pemerintah yang bertugas untuk melaksanakan inisiatif desa KB. Aksi program disusun secara berjenjang dan kooperatif oleh BKKBN sebagai badan pelaksana teknis resmi, mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan sampai ke tingkat desa masing-masing.

Menurut BKKBN program keluarga berencana bisa dikatakan berhasil apabila masuk beberapa kriteria, diantaranya yang pertama, apakah lokasi kampung KB memiliki Rumah DataKu(Rumah Data Kependudukan). Yang dimaksud dengan rumah dataku adalah tempat yang berfungsi sebagai pusat data dan intervensi permasalahan data kependudukan di tingkat mikro mulai dari mengevaluasi, mengumpulkan, memverifikasi, menganalisis data yang bersumber dari, oleh, dan masyarakat sebagai basis untuk intervensi pembangunan di kampung KB dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Data yang dimasukkan kedalam Rumah DataKu antara lain mencakup tentang Kesehatan, Demografi Kependudukan, data Bina keluarga, hingga Data Keikutsertaan Ber-KB.

Selanjutnya yang kedua, apakah di lokasi Program KB tersebut ada duta GENRE (Generasi Berencana) yang berperan penting untuk mensosialisasikan bahwa keluarga adalah segala galany. Genre adalah suatu program yang

diluncurkan oleh pemerintah lewat Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional. Program Genre merupakan program yang mengedepankan pembentukan karakter bangsa dikalangan generasi muda. Program ini merupakan wadah untuk mengembangkan karakter bangsa karena mengajarkan remaja untuk menjauhi pernikahan Dini, Seks Pra Nikah hingga NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat adiktif) guna menjadi remaja tangguh dan dapat berkontribusi dalam pembangunan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang mengatur pembagian urusan pemerintahan menyoroti fungsi penting BKKBN, khususnya kegiatan Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk yang dilaksanakan oleh setiap tingkatan. Terlepas dari kenyataan bahwa pemerintah telah menetapkan program KB, diyakini bahwa program tersebut secara bertahap memburuk dari sejumlah perspektif yang berbeda, dimulai dengan tingkat pencapaian peserta yang lebih rendah dan kurangnya pemahaman umum tentang pentingnya program sebagai sebuah program. kebutuhan untuk kesehatan dan kesejahteraan masa depan (Rinah et al., 2020).

Merencanakan dan mengatur keluarga adalah soal kemanusiaan yang sekarang ini sedang diusahakan pelaksanaan oleh pemerintah dan rakyat Indonesia. Jika pembangunan itu adalah pembangunan manusia, maka kelahiran manusiapun juga harus di atur. Pengaturan tersebut harus diadakan supaya kenaikan produksi tidak terkalahkan oleh angka kelahiran anak. Disamping itu, pertumbuhan penduduk yang tidak disertai dengan pertumbuhan yang cukup dalam produksi nasional dapat juga menimbulkan berbagai masalah yang berkaitan dengan kurangnya

fasilitas pendidikan, kurangnya penyediaan makanan, kurangnya pelayanan kesehatan, kesempatan kerja, dan lain sebagainya. Sejalan dengan langkah strategis ke depan (Todaro, 2000).

BKKBN memiliki tanggung jawab untuk lebih berperan aktif pada :

1. Penguatan pemahaman fungsi-fungsi keluarga terutama dalam hal penguatan mental dan karakter seluruh anggota keluarga
2. Pembinaan anak usia dini melalui Bina Keluarga Balita (BKB) Holistik Integratif agar terbentuk karakter anak sejak usia dini
3. Pembinaan bagi keluarga yang memiliki remaja, serta pembinaan langsung kepada remaja dalam menyiapkan generasi bangsa yang berkualitas melalui kegiatan GenRe
4. Pembinaan melalui keluarga yang memiliki lansia peningkatan ketahanan ekonomi keluarga melalui kegiatan-kegiatan serta pengembangan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) (Mardiyono, 2017)

Program kependudukan, Keluarga berencana dan pembangunan keluarga (KKBPK) pada saat ini sudah mulai menurun dan gaungnya sudah jarang terdengar seperti dulu lagi. Sehingga kegiatan ini harus direvitalisasi kembali serta diadakan gerakan-gerakan untuk kembali menggalakkan program Keluarga Berencana tersebut.

Keberhasilan program KB tidak hanya mengandalkan pemerintah saja, namun peran masyarakat juga dapat mempengaruhi keberhasilan program ini. Partisipasi masyarakat sangat berpengaruh dalam Program KB, terutama dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat tingkat kampung atau yang setara dengan program KB

dan program-program pembangunan lainnya yang telah disesuaikan oleh masing masing wilayah. Program KB akan memenuhi kebutuhan masyarakat melalui pelaksanaan integrasi program lintas sektor, mensejahterakan masyarakat dan pembangunan masyarakat berbasis keluarga.

Provinsi Kepulauan Riau merupakan salah satu yang ikut serta dalam mensukseskan program kampung keluarga berencana. Dengan meningkatnya penduduk, Provinsi Kepulauan Riau merupakan salah satu yang ikut serta dalam mensukseskan program Kampung Keluarga Berencana berdasarkan surat keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 812 tahun 2017 tentang kelompok kerja Kampung Keluarga Berencana Kepulauan Riau tahun 2017.

Berdasarkan data Badan Pusat statistik (BPS), di Indonesia sendiri terkhususnya Kepulauan Riau, persentase wanita berumur 15 – 49 tahun yang mengikuti program Keluarga Berencana semakin menurun dari tahun ke tahun. Dimana pada tahun 2020 persentase wanita berstatus kawin yang menggunakan atau memakai alat KB sekitar 42,45 %, dibandingkat dengan tahun 2022 sekitar 41,24 %. Penurunan tersebut merupakan salah satu bentuk dari alasan bertambahnya pertumbuhan penduduk

Tabel 1. 1 Jumlah Kampung Keluarga Berencana di Provinsi Kepulauan Riau

NAMA	JUMLAH
Kabupaten Bintan	16 (enam belas)
Kabupaten Karimun	23 (dua puluh tiga)
Kota Tanjungpinang	5 (lima)

Kabupaten Kepulauan Anambas	9 (sembilan)
Kota Batam	13 (tiga belas)
Kabupaten Natuna	33 (tiga puluh tiga)
Kabupaten Lingga	26 (dua puluh enam)

Sumber Data: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, laju pertumbuhan penduduk semakin meningkat. Secara keseluruhan wilayah Kepulauan Riau terdiri dari beberapa Kabupaten/Kota, Dimana memiliki peningkatan jumlah penduduk. Kota Tanjungpinang dengan jumlah penduduk yang terus meningkat setiap tahunnya sementara kota tanjungpinang itu sendiri memiliki beberapa kampung KB di dalamnya. Untuk itu perlu ditinjau kembali bagaimana pelaksanaan kampung KB di Kota Tanjungpinang.

Tabel 1. 2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kecamatan di Kota Tanjungpinang

Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)		
	2019	2021	2022
Bukit Bestari	56. 597	54.120	54. 912
Tanjungpinang Timur	96. 218	114. 875	120. 480
Tanjungpinang Kota	20. 196	19. 512	19. 847
Tanjungpinang Barat	47. 801	44. 381	44. 615
Kota	-	233.367	239. 854

Tanjungpinang			
---------------	--	--	--

Sumber. Badan Pusat Statistik Kota Tanjungpinang

Perencanaan Kampung Keluarga Berencana di Kota Tanjungpinang berdasarkan surat keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 261 tahun 2017 tentang kampung keluarga Berencana tahun 2017 berisi tentang penetapan Kampung keluarga Berencana di Kota Tanjungpinang dan menegaskan kepada camat se Kota Tanjungpinang untuk memfasilitasi pembentukan, pengelolaan dan pembinaan Kampung Keluarga Berencana dan memberikan laporan pertanggungjawaban kepada walikota melalui kepala dinas kesehatan , pengendalian penduduk dan keluarga berencana (Afandi & Fahmi, 2022).

Berdasarkan data dinas kesehatan tahun 2019 , Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana kota Tanjungpinang Program Kampung Keluarga Berencana dilaksanakan pada 5 kelurahan dan di 4 kecamatan di Kota Tanjungpinang, diantaranya:

Tabel 1. 3 Jumlah dan Persebaran Kampung KB di Kota Tanjungpinang

No.	NAMA KAMPUNG KB	LOKASI KAMPUNG KB
1	Kampung KB Cemara (Ceria, Elok, Maju, Asri, Rapi dan Aman)	Tanjung Unggat, Kelurahan Tanjung Unggat, Kecamatan Bukit Bestari
2	Kampung KB Gadis (Guyub, Aman, Damai, Indah Sejahtera)	Kampung Dompok Lama, Kelurahan Dompok, Kecamatan Bukit Bestari
3	Kampung KB Buah Ganas (Bulang Aman Sehat Siaga Mempersona Selalu)	Kampung Bulang , Kelurahan Kampung Bulang, Kecamatan Tanjungpinang Timur

4	Kampung KB Sukses	Kampung Sei Ladi, Kelurahan Kampung Bugis, Kecamatan Tanjungpinang Kota
5	Kampung Kb Sinergi	Kampung Jawa, Kelurahan Tanjungpinang Barat, Kecamatan Tanjungpinang Barat

Sumber Data: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Tanjungpinang Tahun 2019

Berdasarkan data di atas, dimana penduduk di daerah Tanjungpinang Timur memiliki penduduk terbanyak diantaranya yang lainnya. Dimana di daerah tersebut ada pelaksanaan program Kampung KB, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Kampung KB di daerah Kampung Bulang, Kelurahan kampung Bulang, Kecamatan Tanjungpinang Timur dengan jumlah penduduk yang terbanyak. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Kampung KB Kelurahan kampung Bulang, Kecamatan Tanjungpinang Timur dengan jumlah penduduk yang tergolong banyak. Melihat kepadatan penduduk, dengan adanya program Kampung KB dapat menjadi angin segar untuk melakukan pembangunan keluarga yang berkualitas melalui Program Kampung KB yang dilaksanakan oleh pengelola dan masyarakat setempat.

Selain itu dari literatur yang penulis baca bahwa untuk penentuan pemilihan kampung KB yaitu berdasarkan kriteria daerah merupakan daerah pesisir, terpencil, adanya kawasan industri. Alasan tersebut meyakinkan penulis untuk meneliti di wilayah Kampung Bulang dikarenakan lokasi yang tepat sesuai kriteria. Adapun jumlah penduduk Kampung Bulang sebagai berikut:

Jumlah laki-laki	4194 orang
Jumlah perempuan	4292 orang
Jumlah total	8486 orang
Jumlah kepala keluarga	2656 KK

Sumber: profil kelurahan Kampung Bulang

Tabel 1.4 Pembinaan PUS dan Kesertaan dan ber-KB

	URAIAN	PUS DAN KESERTAAN KB					
		JALUR PELAYANAN		TAHAPAN KS		JAMINAN KESEHATAN NASIONAL	
		PEMERINTAH	SWASTA	SELURUH TAHAPAN KS	KPS & KS 1	PENYEBAN TUNJANGAN	BUKTI PENYEBAN TUNJANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	JUMLAH PASANGAN USIA SUBUR (PUS)			1382		583	763
2.	JUMLAH PESERTA KB AKTIF:	642	611	1253		519	705

	a. Iud (I)	53	49	102		38	63
	b. MOW (OW)	44	28	72		37	35
	c. MOP (OP)	0	0	0		0	0
	d. Kondom (K)	53	63	116		38	70
	e. Implan (IP)	73	36	109		49	60
	f. Suntik (S)	270	279	549		208	329
	g. Pil (P)	149	156	305		149	148
3.	Jumlah pasangan usia subur bukan peserta KB:			129		64	58
	a. Hamil (H)			27		8	7
	b. Ingin Anak Segera (IAS)			52		27	28
	c. Inginn Anak Ditunda (IAT)			27		16	11
	d. Tidak Ingin Anak Lagi (TIAL)			23		13	12

Sumber: Petugas Keluarga Berencana Kelurahan Kampung Bulang Kecamatan Tanjungpinang Timur Tahun 2022

Dilihat dari data pembinaan PUS serta Keikutsertaan ber-KB masih ada masyarakat pasangan usia subur yang tidak mengikuti program KB di daerah Kelurahan Kmapung Bulang. Jadi disini penulis tertarik untuk meneliti Program Kampung KB untuk mengetahui bagaimana implementasi program tersebut, dan bagaimana peran pemerintah serta intansi terkait dalam menjalankan program tersebut.

Adapun permasalahan yang telah peneliti jelaskan , maka peneliti menarik sebuah judul yaitu ”EVALUASI PROGRAM KAMPUNG KELUARGA BERENCANA DI KOTA TANJUNGPINANG” (Studi Kasus Kampung Bulang ,Kecamatan Tanjungpinang Timur)

1.2 Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah nya yaitu: “ Bagaimana Pelaksanaan Program Keluarga Berencana di Kampung Bulang, Kecamatan Tanjungpinang Timur “ .

1.3 Tujuan Penelitian

Evaluasi terhadap sebuah program pembangunan merupakan hal yang penting untuk mendapatkan informasi mengenai capaian dari program tersebut. Evaluasi terhadap program KB bertujuan untuk mendapatkan informasi yang komprehensif dalam pelaksanaan dan implementasi program KB dalam meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Sehingga dapat menjadi landasan bagi pemerintah maupun masyarakat dalam melaksanakan model atau pun strategi dalam pelaksanaan program pembangunan di masa yang akan datang.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat di ambil oleh peneliti dari penelitian ini diantaranya sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan kepustakaan Ilmu administrasi Negara yang berkaitan dengan evaluasi Kebijakan Publik.

1.4.2 Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai alternatif informasi dan bahan referensi untuk peneliti-peneliti yang tertarik pada evaluasi pelaksanaan kampung keluarga berencana.

